

GUBERNUR LAMPUNG KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G///S//II.05/HK/2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN RUAS JALAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG MULAI DARI PEMATANG PANGGANG SAMPAI DENGAN BATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN PANJANG 146,35 Km OLEH DIREKTORAT BINA TEKNIK, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyeleggaraan usaha dan atau kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL;
 - d. bahwa kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km Oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, merupakan kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL, dan diperkirakan dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;

- e. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan tersebut, maka perlu disusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum perlu memiliki izin lingkungan dan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

- 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: 1. Keputusan

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Stratanya Sebagai Jalan Nasional;
- Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MenLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- 3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung Nomor 660/061/II.05/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung Mulai Dari Pematang Panggang Sampai Dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur Oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN RUAS JALAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG MULAI DARI PEMATANG PANGGANG SAMPAI DENGAN BATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN PANJANG 146,35 Km OLEH DIREKTORAT BINA TEKNIK, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

KESATU

: Memberikan izin lingkungan kepada:

a. Nama Pemrakarsa

: Direktorat Bina Teknik, Direktoral Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

b. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Ruas Jalan Nasional di Provinsi dari Lampung mulai Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/ Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

c. Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Pelaksanaan

Jalan Nasional III.

d. Alamat Kantor : Jalan H.M. Noerdin Pandji RT.03

RW.01 No. 78 KM 7, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan.

e. Lokasi Kegiatan : Ruas Jalan Nasional di Provinsi

Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/ Kabupaten Lampung Timur dengan

panjang 146,35 km.

KEDUA

: Penanggung Jawab kegiatan dan/atau usaha (Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III) dalam melakukan kegiatannya berkewajiban :

- 1. Melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km, pada saat:
 - a. Pengoperasian jalan;
 - b. Pemeliharaan rutin;
 - c. Pemeliharaan berkala;
 - d. Peningkatan struktur; dan
 - e. Pelebaran jalan didalam ruang milik jalan (rumija);
- 2. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap penurunan kualitas udara (parameter HC, CO, opasitas), debu dan kebisingan yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor maupun operasional alat berat pada saat pengoperasian jalan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan struktur dan pelebaran jalan di dalam rumija agar tidak melebihi ambang batas emisi gas buang dan baku mutu kebisingan;
- 3. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap badan jalan serta bangunan pelengkap jalan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, potensi genangan pada badan jalan, penurunan kondisi jalan dan potensi kemacetan lalu lintas:
- 4. Mengendalikan terjadinya perubahan penggunaan lahan di rumija dan menjaga lingkungan ruas jalan dari gangguan yang disebabkan oleh binatang-binatang yang melintas.
- 5. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait dengan aspek sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja lokal pada saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan struktur dan pelebaran jalan di dalam rumija;

- 6. Memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau perusakan lingkugan hidup;
- Mengembangkan teknologi dan metodologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 8. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (continuous improvement) sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KETIGA

: Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

KEEMPAT

- : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
 - c. Badan Penglolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung;
 - d. Badan Penglolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Mesuji;
 - e. Badan Penglolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Tulang Bawang;
 - f. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - g. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Lampung Timur.

KELIMA

: Instansi pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam keputusan Kepala BPLHD Provinsi Lampung ini serta Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

KEENAM

Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung setiap saat dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum keempat.

KEDELAPAN

: Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KESEMBILAN

: Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dan Diktum Kesepuluh.

KESEPULUH

: Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannnya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEBELAS

: Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDUA BELAS:

Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal #6 ~ 3 ~

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
 Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
- 4. Kepala BPLHD Kabupaten Mesuji;

- Kepala BPLHD Kabupaten Tulang Bawang;
 Kepala BLHD Kabupaten Lampung Tengah;
 Kepala BLHD Kabupaten Lampung Timur;
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G//SO/II.05/HK/2015 TANGGAL : 46 - 5 - 2015

MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUAS JALAN NASIONAL PEMATANG PANGGANG SAMPAI DENGAN BATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN PANJANG 146,35 Km OLEH DIREKTORAT BINA TEKNIK, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

	Dampak L	ingkangan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengel	olaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelokan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peiaksana	Pengawas dan Pelaperan
1.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang kendaraan bermotor: • parameter HC, CO (kategori bensin) • parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori 1.3 (khusus roda dua) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	Mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor	1. Penyediaan Traffic Control System 2. Kendaraan bermotor (tipe lama, tipe baru, angkutan urnum) wajib menjalani uji emisi dan yang dinyatakan lulus uji emisi. 3. Penggunaan kendaraan yang memenuhi Laik Jalan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya. 4. Merujuk Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang program langit biru maka diperlukan pemantauan kualitas udara ambien (road side monitoring) secara berkala kemudian hasilnya dapat digunakan juga dalam laporan pemantauan kualitas udara pemantauan kemudian pemantauan kemudian pemantauan kemudian pemantauan pemantauan kemudian pemantauan kemudian pemantauan pemantauan kemudian pemantauan pemantauan kemudian pemantauan pemantauan kemudian pemantauan pemantauan pemantauan kualitas udara pemantauan pemantauan kualitas udara road	- Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km - Titik sampling udara yang pernah dilakukan 1. Titik 1: S 040 53'724" E 1050 31'214" (perbatasan Lampung Timur) 2. Titik 2: S 040 51'546" E 1050 30'122" (Desa Sanggar Buana) 3. Titik 3: S 040 29'280" E 1050 15'180" (Lintas Timur L.P. Manggala) 4. Titik 4: S 040 16'968" E 1050 13'282" (PS Unit II Banjar Agung) 5. Titik 5: S 040 09'954" E 1050 12'900" (JI. Raya Mesuji)	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPIN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkangan Hidup Kabupaten Lampung Timur

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolana			Periode	Institusi Pengel	olann Lingkungan Hidup
No.	Jenis Da mpa k	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungas Hidep	Up zyn Pengelelaan Lis gkungan Hidu p	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawan dan Pelaporan
					side monitoring (program langit biru)				-
2.	Potensi genangan pada badan jalan	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu: Tersumbat Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen	Tidak terjadinya genangan pada badan jafan	Mencegah terjadinya genangan pada badan jalan	Pembersihan dan pemeliharaan saturan tepi jatan Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi untuk Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. Koordinasi dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman untuk mengendalikan limpasan drainase dituar catchment area saluran tepi jatan. Pembuatan mambole Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi untuk Kabupaten Mesuji, Kabupaten tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur.	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Barwang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Barwang - Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Bappeda Provinsi Lampung - Bappeda Kabupaten Mesuji - Bappeda Kabupaten Tulang - Bappeda Kabupaten Lampung Tengah - Bappeda Kabupaten Lampung Tengah - Bappeda Kabupaten Lampung Tengah

	Dampak Li	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengek	olaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelelaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prinksens	Pengawas dan Pelaporan
3.	Penurunan kondisi jalan	tingkat pelayanan jalan berkarang akibat volume lalu lintas, kejadian aham dan penilaku negatif manusia. Kendaraan yang tidak sesuai armanah Peraturan Pemerintah 79 tahun 2013 Pasal 48 Ayat 3 yang berbunyi Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksad dalam Pasal 47 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	Mencegah terjadinya penurunan kondisi jalan	Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 teatang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 20 ayat 1 dan 5: 1. Penilikan jalan meliputi : a. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian- bagian jalan; b. Pelaporan atas hasil pengamatan; c. Pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan d. Menerima keluhan/masukan/i nformasi dari masyarakat/ pengguna jalan. 2. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalaan waktu 1 hari sejak terjadinya gangguan tersebut, penilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Metaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi	Ruas Jaian Nasional di Provistsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batan Kabupaten Lampung Tengah Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN Hidalam hal ini Satker Pelaksanan Jalan/Satker Lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Larapung Tengah - Badan Lingkungan HidupKabupaten Lampung Timur

	Dampak I	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Peng	elolaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upsys Pengelohan Liegkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pclakena	Pengawas dan Pelaporan
					yang berwenang;		1		
ł					b. Memasang rambu				
					peringatan				
l					sementara sesuai		<u> </u>		
					pedoman yang				
[berlaku di lokasi				
					adanya gangguan tersebut sebelum				1
					penanganan				
					perambuan				
					selengkapnya				· I
l					dilakukan oleh				1
					satuan kerja		1		
ŀ				:	penanganan jalan				
					atau satuan kerja				
					lain yang				
					ditetapkan oleh				
					penyelenggara				
					j alan se suni				
					wilayah kerjanya;				
ľ					c. Mengusulkantinda				
					kan yang pertu diambil atas				
					di am bil atas pelaporan dari				
					hasil pengamatan				
		ĺ			kepada				
					penyelenggara				
					jalan atan instansi				
				:	yang berwenang.				
					Merujuk Peraturan Menteri				
					Pekerjaan Umum Nomor 13				
					Tahun 2011 tentang Tata				
					Cara Pemeliharaan dan				
					Penilikan Jalan Pasal 15				
J					ayat 1 dan 2 :				
- 1					1. Perneliharaan rutin		 		
- [jalan sebagaimana				1
					dimaksud pada Pasal I		1		
					ayat (14) adalah				
					kegiatan merawat serta				
		1			memperbaiki		l L		

	Dampak L	ingkungan		Tujusa Rencana Pengelolasa			Periode	Institusi Peng	elolaan Lingkungen Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Bampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelohan Lingkungan Hidep	Lokusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengeiolasa Lingkangan Hidup	Pcieksaus	Pengawas dan Pelaporan
					kerusakan-kerusakan				
				1	yang terjadi pada ruas-				
		1		İ	ruas jalan dengan				
					kondisi pelayanan				
ĺ,					mentap.				
					2. Pemeliharaan berkala		i l		
i		İ		*	jalan sebagaimana				
		1			dimaksud pada Pasal 1				
					ayaat (15) adalah		1		
į		1		•	kegiatan penanganan				
:					pencegahan terjadinya				
					kerusakan yang lebih				
					luas dan setiap				
					kerusakan yang				
					diperhitungkan dalam				
					desain agar penurunan				
į					kondisi jalan dapat				
				İ	dikembalikan pada]		
				l l	kondisi kemantapan				
		}			sesuai dengan rencana.		Į.		
				:	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 8 tentang				
1.7					lalu lintas dan angkutan				
i					jalan, Penyelenggaraan lalu				
		ł			lintas dan angkutan jalan di				
					bidang jalam oleh				
					Kementerian Pekerjaan		1		
					Unum Direktorat jenderal				
					Bina Marga meliputi: Inventarisasi tingkat				
				· [pelayanan jalan dan				
		l			permasalahannya		i		
					Penyusunan rencana				
		ĺ			dan program				
					pelaksanaannya serta				J
					penetapan tingkat				
					pelayanan jalan yang diinginkan				
				1	Perencanaan,				
				1	pembangunan, dan		1		
					optimalisasi		1		
					pemanfaatan roas jalan		1		
					Penetapan kelas jalan				

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolana			Periode	Institusi Penge	lolaan Lingkungan Hidep
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengeiolaan Lingkungan Hidup	Pciaksana	Pengawas dan Pelaporan
					pada setiap ruas jalan				
					 Uji kelaikan fungsi jalan sesuai standar 				
					keamanan dan				
					keselamatan berlalu				
					tinta				
					 Pengembangan sistem 				
					informasi dan				
					komunikasi di bidang prasarana jalan.				
					 Penyidikan terhadap 				
					pelanggaran perizinan				
					angkutan umum,				
				1	peryaratan teknis dan				
					kelaikan jalan				
					kendaraan bermotor				
					yang memerlukan keshtian dan/stau				
					peralatan khusus yang				
					dilaksanakan sesuai				
					dengan undang-undang.				
					Berdasarkan				
					Undang-Undang Nomor 22				
					Tahun 2009 Pasal 9 tentang				
					lahi lintas dan angkutan				
					jalan, Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di				
1					bidang sarana dan prasarana				
					lalu lintas oleh Kementerian				
					Perhubungan meliputi :				
		"			 Penetapan reacana 				
ŀ					umum lalu limtes dan				
					angkutan jalan				
					Menejemen dan rekayasa lalu lintas				
					Persyaratan teknis dan				
					laik jalan kendaraan				
					bermotor				
					 Perizinan angkutan 				
					umum				
					Pengembangan sistem				
					informasí dan				
					komunikasi di bidang sarana dan prasarana				
					kalu lintas dan angkutan				
]					jalan				
	•				Pembinaan sumber daya				

	Dampak I	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Peng	eloiaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungas Hidup	Upaya Pe ngelo laan Lingkungan Hidop	Lokasi Pengelolasa Lingkungan Hidup	Pengelolasa Lingkangan Hidup	Peleksana	Pengawas dan Pelaporan
					manusia penyelenggara				
					sarana dan prasarana tatu lintas dan angkutan		1		
ļ					jejan		ì I		
					Penyidikan terhadap		1 1		1
					pelanggaran perizinan		1 1		
		1		Ì	engkutan umum,		1 1		
					peryaratan teknis dan ketaikan jalan		1 1		1
		}			kefaikan jalan kendaraan bermotor		1 1		
				Į.	yang memerlukan		l i		•
}				-	keshlian dan/stau		1 1		•
- 1				į.	peralatan khasus yang		1 1		ì
l				[dilaksanakan sesuai		1 1		
İ		1			dengan undang-undang Berdasarkan		1 1		ļ
				ļ	Undang-undang Nomor 22		1		
ŀ		ì			Tahun 2009 Pasal 12		1		
					tentang lahu lintas dan		[]		
Ì					angkutan jalan,				
					penyelenggaraan lahu lintas		i		1
		ļ			dan angkutan jalan di bidang registrasi dan identifikasi		1		
[· · · · ·		•	kendaraan bermotor dan		ì		
[[pengemudi, penegakan		1		•
l					hukum, operasional		1		ŀ
		1			menejemen dan rekayasa		1		
				į	lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh		1 1		ţ
				[Kepotisian Negara Republik		1 1		
		1		ţ	Indonesia meliputi :				
					Pengujian dan				
ĺ		<u> </u>			penerbitan SIM		1		1
					kendaraan bermotor		1		İ
- 1		1		ļ	Pelaksanaan registrasi dan identifikasi		1		
					dan identifikasi kendaraan bermotor		1		\
					Pengumpulan,		1		
]		1	pementanan,				1
- 1					pengolahan dan				1
		}			penyajian data lalu				1
ŀ					lintas dan angkutan jalampengelolaan pusat				1
[1			pengendalian sistem		1		1
				1	informasi dan		1		}
ŀ					komunikasi lalu lintas				
j				_	dan angkutan jalan		<u> </u>		

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencama Pengelolaan			Periode	Institusi Pengel	olaan Lingkungan Hidap
No.	Jenis Dampak	Sumber Dempek	Tolok Ukur Dampak	Lingkunges Hidup	Upnya Pengelolaan Liagkungan Hidup	Lokusi Pengelolanu Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkangan Hidup	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas Penegakan hukum Pendidikan bertalu lintas Pelaksanaan menejemen rekayasa lalu lintas Pelaksanaan menejemen operasional lalu lintas.				
4.	Perubahan penggunaan lahan tak terkendali di RUMIJA	Bangunan/kegiatan di dalam rumija	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029	Mencegah perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Mengendalikan pemanfaatan Rumija	1. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 20 ayat 1 dan 5: Penilikan jalan meliputi: a. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan; b. Pelaporan atas hasil pengamatan; c. Pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan d. Menerima keluhan/masukan/i nformasi dari masyarakat/	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan bertangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung - Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pengalran dan Penmukiman Bidang Tata Ruang Provinsi Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan

	Dampak Li	ing kungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Peng	riolaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Up aya Pengelolaan Lin g kungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkangan Hidup	Pelaksana	Pengawas dan Pelapuran
1					pengguna jalan. Apabita terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan tertadap kesetamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalam waktu l hari sejak terjadinya gangguan tersebut, penilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikus: a. Melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang; b. Memasang rambu peringatan sementara sesuai pedonan yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapnya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya; c. Mengusulkantinda kan yang pertu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan				Tata Ruang Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum Seksi Tata Teknik dan Bina Marga Kabupaten Tulang Bawang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Lampung Timur Dinas Pengairan dan Permukiman Bidang Tata Ruang Provinsi Lampung

	Dampak 1	ingkungaa		Tujuan Rencana Pengelolaan	VBrI-I	Taland Barrana	Periode	Institusi Penge	lolaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampa k	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelelaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prinksa na	Pengawas dan Peluporan
					kepada				
					penyelenggara				
	•				jalan atau instansi		[
					yang berwenang.				
					Memasang patok batas RUMUA				ļ
					3. Memasang papan				
					himbauan atau lerangan				İ
				-	tidak melakukan				Į
					kegistan di RUMIJA		1		
	1				4. Pemberian ijin usaha				
					dan/atau kegiatan harus				
					sesuai dengan RTRW				
		1			dan peraturan daerah		ì		
					yang berlaku				
		1			5. Merujuk Peraturan				
					Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20		1		
				Į	Tahun 2010 Pasal 42				
ļ					Ayat 4 maka		1		
					penyelenggara jalan				
		[į,	melakukan pengawasan				
		1			atas pelaksanaan				
(pemeliharaan bangunan		j		
		ļ		ļ	dan jaringan utilitas,				
					iklan dan media		1		
					informasi, bangunan-				
				; F	bangunan serta				
ļ		1		}	bangunan didalam rumija				1
		[6. Merujuk Peraturan		1		
		1			Menteri Pekerjaan				
					Umum Nomor 20				
		l í			Tahun 2010 Pasal 5				
		[Ayat 4 maka pemberian				
					izin untuk pemanfaatan				
					rumija nasional				
					dilakukan setelah				
ļ					memperoleh				1
					pertimbangan teknis				
		<u> </u>		1.	dari kepala				

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengel	olean Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Bampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelelaan Liagkungan Hidup BBPIN/BPIN	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkangan Hidup	Pelaksana	Pengawas dan Pelaperan
5.	Perubahan pengganaan tahan tak terkendali disekitar RUMIJA didalam Ruwasja	Sumber Dampak Bangunan/kegiatan disekitar RUMUA didalam Ruwasja	- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rescam Tahu Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011-2031 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umam Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Permanfastan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	Mengendalikan rencana usaha dan/atan kegiatan disekitar RUMUA didalam Ruwasja	I. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nonsor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 20 ayat 1 dan 5 : Penilikan Jalan meliputi : a. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan; b. Pelaporan atas hasil pengamatan; c. Pengusulan tindakan yang diperlukan tenadap hasil pengamatan; dan d. Menerimaa keluhan/masukan/i nformasi dari masyarakat/pengguna jalan. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan ganggun terhadap keselamatan pengguna jalan dan kesmanan konstruksi jalan, paling lambat dalam waku 1	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Penastang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Lingkangan	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung - Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pengairan dan Permukinan Bidang Tata Ruang Provinsi Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukinan dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji - Dinas Pekerjaan Umum Seksi Tata Teknik dan Bina Marga Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah
					hari sejak terjadinya gangguan tersebut, penilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:				- Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Lampung

	Dampak I	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Peng	elolaan Lingkungan Fildup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkwagan Hidup	Upuya Pengelelaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkangan Hidup	Pengelolaan Lingkangan Hidup	Pelakeana	Pengawas dan Pelaporan
					a. Melaporkan		<u> </u>		Timur
	Į.				kepeda				
i					penyelenggara		1 [
1	į	}		1	jalen etas instansi				
					yang berwenang;				
				1	b. Memasang rambu		1		
				į.	peringatan				
1	J				sementara sesuai		[
					pedoman yang		i		
ŀ		ļ			berlaku di tokasi				
l				[adanya gangguan				
1		}			tersebut sebelum		1		
•				1	penanganan				
					perambuan		1		1
1	İ]	seiengkapnya		1		
l					dilakukan oleh		1		
		Í			satuan kerja		i i		
l					ponanganan jalan		1		
				[atau satuan kerja				
					lain yang				1
ŀ	ł			•	ditetapkan oleh				
}					penyelenggara				1
l .		 			jalan sesuai				
'					wilayah kerjanya;				
1		l		į.	Mengusulkantindakan yang perlu diambil atas				
					pelaporan dari basil]
					pengamatan kepada				
l .					penyelenggara jalan				
[atau instansi yang		1		
					berwenang.				
				· L	2. Memasang papan		1		
		ŀ		į	himbauan atau larangan				
					tidak melakukan kegiatan di RUWASJA		1		
I		[3. Pemberian ijin usaha				
I]		1					
		l i			dan/atau kegistan harus sesuai dengan				
1	i			l .					1
					peraturan daerah sentang RTRW				
					4. Pengaturan Garis				ì
							1		
	<u></u>		_		Sempadan Bangunan		<u> </u>		<u> </u>

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengel	olaan Lingkuagan Hidup
No.	Jenis Dampak	Somber Dampak	Tolok Ukur Bampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan lilidap	Lokasi Pragelokan Lingk ungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas dan Peluporan
					(GSB) menjadi bagian dari proses pengajuan ijin. 5. Merujak Peraturan Menteri Pekerjaan Unuan Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 42 Ayat 5 maka Pengawasan stas perkembangan pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan 6. Merujak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 3 maka penerbitan izin penggunaan ruwasja untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan gedung dan bangunan penganan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari				
6.	Potensi kemacetan lafu lintas	- Kelalaian pengguna jalan yang tidak memaluhi tata tertib lahi lintas - Volume kendaraan melebihi kapasitas jalan atau RVK ≤ 0,85	Undang-Undang Nomor 22. Tahun 2009 tentang Latu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Menteri Pekerjaan Umaan Nomor 19 Tahan 2011 teritang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	Mencegah agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas	penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. 1. Penegakan hukum berupa sankai tilang bagi pengguna jalam yang tidak memenuhi aturan lalu limtas 2. Pemasangan rambu Menujuk Peraturan Menteri Perhubungan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kebupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Sclama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkooréinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang	Diffantas Polda Provinsi Lampung Polisi Resort Kabupaten Mesuji Polisi Resort Kabupaten Tulang Bawang Polisi Resort Kabupaten Lampung Tengah

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolan			Periode	Institusi Pengel	olean Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dempak	Tolok Ukur Dampak	Liagkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Petakaana	Progawas dan Pelaporan
			RVK (rasio antara volume lafu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85		tentang rambu lalu lintas 3. Pemberian pertugas yang mengatur lalu lintas 4. Pemasangan marka Merujuk Peraturan Menteri Perhubangan Nomor 34 tahuan 2014 tentang Marka Jalan 5. Jika RVK >0,85 maka diperlukan pelebaran jalan 6. Melakukan menejemen rekayasa lalu lintas			Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	Lampung Timur Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan InformasiProvinsi Lampung Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan InformasiKabupaten Mesuji Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat LaluLintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan InformasiKabupaten
7.	Potensi kecetakaan lalu lintas	Kelalaism pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas Geometrik jalan tidak sesuai	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	- Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas - Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011: - Pasal 55 bahwa setiap perencanaan jalan harus mengikuti kaidah geometrik jalan yang berazaskan keselamatan lalu lintas - Pasal 58 bahwa perlengkapan jalan harus direncanakan sesuai	Permasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas Pernetiharaan dan pemasangan marka Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM tentang marka jalan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Konsunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur - Ditlantas Polda Provinsi

	Dampak l	Lingkungan	_	Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Peng	riolean Lingkungaa Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Bampak	Lingkungae Hidup	Upaya Pengelolasa Lingkungan Hidap	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkangan Hidup	Prinkanna	Pengawas dan Pelaporan
		- Keterbatasan jarak	- Peratuwan Menteri Pekerjaan	dengan ketentuan yang berlaku dengan prioritas mewajudkan keselamatan lalu lintas - Memenahi Peraturan	Pemberian petugas pengatur lalu lintas Pemberian fasilitas penyebrangan di pusat kegiatan				Lanapung - Polisi Resort Kabupaten Mesuji - Polisi Resort Kabupaten Tulang Bawang - Polisi Resort Kabupaten
		pandang skibat bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan- bangunan,	Umusa Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011: Pasul 10 hahwa bangunan dan jaringan utilitas, ikian dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam	(permakiman/sekoluh/ masjid) 5. Penegakan hukum bagi pengguna julan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan parkir di				Lampung Tengah - Polisi Resort Kabupaten Lampung Timur - BBPIN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional
		bangunan gedung dalam rumija		ramija harus memenuhi ketentuan tidak	badan jalan 6. Memperbaiki				
		1		mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi	geometrik jalan 7. Pemasangan perlengkapan jalan				
					8. Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga				
					Nomor 2 bahwa Pelaksanam				
	ļ				pemotongan/perapihan pohon untuk jalan interurban yang masuk				
					ke ibukota propinsi/kabupaten				
					menjadi tanggungjawab Dinas Kebersihan				
					setempat 9. Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga No.				
					2 behwa untuk jelan interurban diluar				
					ibukota propinsi/kabupaten				
					menjadi tanggungjawabBBPJN 10. Pemberian ijin usaha				
					den/stau kegistan harus sesuai dengan				
		<u> </u>	<u></u>	<u></u>	peraturan daerah				

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengel	olaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaau Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					tentang RTRW 11. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 42 Ayat 5 bahwa Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan 12. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di lokasi RUMAJA dan RUMIJA yang mengurangi kapasitas jalan (side friction)				
8.	Keresahan masyarakat	Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya keresahan masyarakat	Pengadaan posko pengaduan Melakukan pendekatan atau dialog dengan tokoh masyarakat dan warga di sekitar trase jalan nasional	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional
1.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari : Pembersihan bahu Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengel	olaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
2.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan amrian	Pemasangan rambu lalu lintas sementara Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang panduan teknis rekayasa keselamatan jalan. Jenis rambu Merujuk Peraturan menteri Perhubungan No. 13 Tehun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor yang berlaku	Ruas Jalam Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km khususnya STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa	Selama kegiatan pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Timur
2.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat: • Parameter HC, CO (kategori bensin)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama Peraturan Pemerintah Nomor	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama Mengendalikan debu agar	- Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten	Selama kegiatan pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

	Dampak I	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengelo	daan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upsya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporas
		Parameter opasitas (kategori diesel Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Manual Konstruksi dan Bangunan yang berlaku - Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala	Lampung Timur sepanjang 146,35km	kegiatan)	Penyedia jasa konstruksi	Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan berkala	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka: 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan yang berlaku	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km khususnya STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa	Selama kegiatan peningkatan struktur berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan HidupKabupaten Lampung

_	Dampak L	ingkungan		Tujuan Reucana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengele	olaan Lingkungan (Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Bampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelelaan Liagkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelokan Lingkungan Hidup	Pelakuana	Pengawas dan Pelaporan
						_	_		Timar
2.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat: Parameter HC, CO (kategori bensin) Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaram bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alai berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penggunaan perakatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan yang berlaku	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan peningkatan struktur berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satike r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelokaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelokaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelokaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelokaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari peningkatan struktur	Tidak terjadi penunman estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengetolaan sisa material sesuai spesifikasi umum direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan peningkatan struktur berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa koastruksi	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelotaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuaji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
4.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas peningkatan struktur	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka: 1. Pemasangan rambu lalu liatas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan peningkatan struktur berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Direktorat Jenderal Perhubungan Derat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan	Trans Bassician	1 de 1 Novembre	Periode	Institusi Pengel	olaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelokan Lingkungan Hidup	Pengelolana Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas				- Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 901-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km khususnya STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa	Selama kegiatan pelebaran jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPIN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
7	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat: Parameter HC, CO (kategori bensin) Parameter opasitas (kategori diesel) Debu aktifitas pelebaran jalan	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	- Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011 - Penyiraman di lokasi kegiatan pelebaran jalan khususnya siang hari secara berkala	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan pelebaran jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari pelebaran jalan	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas	Selama kegintan pelebaran jalan berlangsung	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana Pengelolaan			Periode	Institusi Pengele	olaan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengeiolaan Lingkungan Hidup	Pdeksane	Pengawas dan Pelapura
						Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	(jika ada kegintan)	r Ruas Jalam Nasional • Penyedia jusa kommunuksi	Lingkungan Hidap Daerah Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tutang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidap Daerah Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
4.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas pelebaran jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka: 1. Pemasangan rambu lahu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pelebaran jalan berlangsung (jika ada kegintan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satke r Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung

B. MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUAS JALAN NASIONAL PEMATANG PANGGANG SAMPAI DENGAN BATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN PANJANG 146,35 km OLEH DIREKTORAT BINA TEKNIK, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

	Dampak L	ingkangan		Тијиап Версала	Bantul Par	nantauan Lingkungaa Hidup		Institusi Pemants	uan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampuk	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Pemantauan Lingkuugan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Puntan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat: Parameter HC, CO (kategori bensin) Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	Mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor	1. Pendataan ada/tidaknya Traffic Control System Analisis analisa deskriptif korelasi ada/tidaknya Traffic Control System 2. Pengukuran langsung emisi kendaraan bermotor di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 3. Inventarisasi kendaraan yang memenuhi Laik Jalan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kercta Tempelan beserta Komponen-Komponennya 4. Analisis deskriptif perbandingan hasil uji emisi dengan parameter baku mutu emisi gas buang kualitas udara ambien (road side monitoring) di lapangan bekerjasama dengan laboratorium	Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km Titik sampling udara: Titik 1: S 04° 53'724" E 105° 31'214" (perbatasan Lampung Timur) Titik 2: S 04° 51'546" E 105° 30'122" (Desa Sanggar Buana) Titik 3: S 04° 29'280" E 105° 15'180" (Lintas Timur L.P. Manggala) Titik 4: S 04° 16'968" E 105° 13'282" (PS Unit II Banjar Agung) Titik 5: S 04° 09'954" E 105° 12'900" (JL Raya Mesuji	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

	Dampak L	ingkungan		T. I	Thomas No.		 	Institusi Pemonta	uan Lingkungan Hidup
No.	Jepis Damoak	Sumber Dampak	Parameter Lingkangan Hidup yang Dipantan	Tujuan Rencana Pemantanan Lingkungan		uaateuan Lingkungsa Hidup	Waktu dan	Pelakrapa	Pengawas dan Pelaporan
				Hidep	Metode Pengumpulan dan Amalisis Data terakreditasi KAN 6. Analisis deskriptif perbandingan hasil kualitas udara ambien dengan baku mutu lingkungan	Lokusi Pantau	Frekuensi		
2	Potensi genangan pada badan jalan	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu: Tersumbat Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bengunan atau PKL Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Mencegah terjadinya genangan pada badan jalan	1. Observasi dan inventarisasi ada/tidak papan rambu dilarang membuang sampah di tepi sungai 2. Inventariasasi surat permohonan pembongkaran kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan PKL yang berada diatas permukaan saluran tepi jalan 3. Observasi dan survey lokusi manhole 4. Observasi lapangan dan identifikasi jenis kegiatan didalam ramija dan ruwasja	Lokasi potensi genangan di Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Tirmur sepanjung 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPFN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan HidupKabupaten Lampung Timur
3.	Penurunan kondisi jalan	- Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan perilaku negatif manusia. - Kendaraan yang tidak sesuai amanah Peraturan Pemerintah 79 tahun 2013 Pasal 48 Ayat 3 yang berbunyi Dimensi kendaraan	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	Mencegah terjadinya penurunan kondisi jalan	Inventarisasi data sekunder perencanaan berupa design umur jalan Observasi lapangan untuk pendataan jenis kerusakan yang terjadi Analisis deskriptif kualitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35kmmengikuti kondisi jalan yang mengalami kerusakan ringan/sedang	6 bulan sekali	BBPJN III	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tengah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah

	Dampak L	ingkungan		Tujuan Rencana	Bootuk Ba-	ranta san Lingky agan Hidup		Institusi Pema	ntsunn Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantan	Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan	Lokesi Pantas	Waktu dan	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e mengacu pada dimensi utanaa kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.	ruf c pade utana motor eliputi lebar, depan, akang telah sesuai	dan Analisis Data	LOADS PRICES	Frekuensi		- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timus	
4.	Perubahan penggunaan lahan tak terkendali di RUMIJA	Bangunan/kegiatan di dalam rumija	- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan	Mencegah perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai Perauran Daerah tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Mengendalikan pemanfaatan Rumija	1. Observasi lapangan 2. Dokumentasi kondisi lapangan 3. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi 4. Inventarisasi ijin lingkungan yang telah terbit 5. Analisis deskriptif kualitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi 6. Inventarisasi rekaman pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan didalam rumija 7. Inventariasi pemberian izin untuk pemanfaatan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung 146,35km Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji - Dinas Pekerjaan Umum Seksi Tata Teknik dan Bina Marga Kabupaten

	Dempak I	ingkungan		Tulus Brasses	Daniel Bar			lastitusi Pemanti	uan Lingkungan Hidup
No.	Jeais Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipuntan	Tujuan Rencasa Pemantanan Lingkungan Hid a p	Metode Pengunpulan dan Analisis Data	zantauan Lingkungan Hidup Lokasi Pantan	Wakto dan Freknensi	Peleksana	Pengawas dan Pelaporun
					rumija nasional dilakukan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari kepala BBPIN/BPIN Analisis deskriptif kualitatif dari hasil observasi lapangan dan				Tulang Bawang - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Lampung Timur
5.	Perubahan penggunaan lahan tak terkendali disekitar RUMDA didalam Ruwasja	Bangunan/kegiatan disekitar RUMIJA didalam Ruwasja	- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011-2031 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Permanfastan Dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan	- Mengendalikan rencana usaha dan/atau kegiahan disekitar RUMIJA didalam Ruwasja - Mengendalikan rencana usaha dan/atau kegiahan disekitar RUMIJA didalam Ruwasja	inventarisasi 1. Observasi lapangan 2. Dokumentasi kondisi lapangan 3. Analisis deskriptif kualitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi 4. Inventarisasi rekaman pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunanbangunan serta bangunan didalam rumija 5. Inventariasi pemberian izin untuk pemanfaatan rumija nasional dilakukan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari kepala BBPJN/BPJN. 6. Analisis deskriptif kualitatif dari hasil	Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji - Dinas Pekerjaan Umum Seksi Tata Teknik dan Bina Marga Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah

	Dampak L	ingkungan		Tuiuan Rencana	Rental De-	mentawan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkangan Hidup yang Dipantan	Pementauan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokesi Pantan	Waktu dan Prehuensi	Pelaksana	Pengawas dra Pelaporan	
					observasi lapangan dan inventarisasi		7100000		- Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Lampung Timur	
6.	Potensi kemacetan lalu lintas	- Kelahan pengguna jalan yang tidak memutuhi tata tertib lalu lintas - Volume kendaraan melebihi kapasitas jalan atau RVK ≤ 0,85	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jahan - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jahan dan perencanaan teknis jahan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85	Mencegah agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas	1. Pendataan sasksi tilang 2. Analisis dengan tabulasi 3. Identifikasi dan dokumentasi rambu dan marka yang ada 4. Analisis dengan tabulasi 5. Truffic counting 6. Analisis perhitungan volume per kapasitas jalan 7. Inventarisasi lokasi yang telah dilakukan menejemen rekayasa talu lintas 8. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil data sekunder	Runs Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Duerah setempat melalui instansi yang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	Ditlantas Poida Provinsi Lampung Polisi Resort Kabupaten Mesuji Polisi Resort Kabupaten Tulang Bawang Polisi Resort Kabupaten Lampung Tengah Polisi Resort Kabupaten Lampung Tengah Polisi Resort Kabupaten Lampung Tenur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah	

	Dampak Li	ingkungan			Book It Do		_	Iastitusi Pemanta	wan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkangan Hidup yang Dipantau	Tujusa Rencena Pemastasan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan	Lokesi Pantan	Wakin dan	Peleksana	Pengawas dan Pelaporan
7.	Potensi kecelakaan	- Kelalaian penggana	- Undang-Undang Nomor 22	- Mengurangi potensi	dan Analisis Data 1. Survey dan Pencatatan	Lokasi potensi/rawan	Frekuensi 6 bulan sekali	BBPJN III yang akan	Dinas Perhubungan, Kommikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker ruas Jalan Nasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Direktorat Jenderal
	lal# lintas	jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas Geometrik jalan tidak sesuai Keterbatasan jarak pandang akibat bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung dalam rumija	Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	kecelakaan lahu lintas Memeruhi Peraturan Memeri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011: Pasal 55 bahwa setiap perencanaan jalan harus mengikuti kaidah geometrik jalan yang berazaskan keselamatan lalu lintas Pasal 58 bahwa perlengkapan jalan harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prioritas mewujudkan keselamatan lalu lintas Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011: Pasal 10 bahwa bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam rumija harus memeruhi ketentuan tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi	rambu dan fasilitas penyebrangan yang ada 2. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 3. Pendataan sanksi tilang 4. Analisis dengan tabulasi 5. Survey geometrik jalan 6. Survey pertengkapan jalan 7. Observasi dan pengumpulan data sekunder Pernangkasan dahan tanaman yang telah dilakukan 8. Pengecekan ijin lingkungan 9. Observasi hasil penertiban PKL	kecelekaan di Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung sepanjang 146,35km		berkoordinasi kepada Pemerintah Dacrah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupatea Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	Perhubungan Darat Direktorat Lahu Lintas dan Angkutan Jalam Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan Hidup Rabupaten Lampung Timur Ditlantas Polda Provinsi Lampung Polisi Reson Kabupaten Mesuji Polisi Reson Kabupaten Tulang Bawang

	Dampak I	ingkungan		Тијиао Веосана	Bentuk Per	nantauan Lingkungaa Hidup		Institusi Pemant	auan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
8.	Keresahan masyarakat	Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya keresahan masyarakat	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey Wawancara dan kuisioner	Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPIN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	Polisi Resort Kabupaten Lampung Tengah Polisi Resort Kabupaten Lampung Timur BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Lingkungan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan HidupKabupaten Lampung Timur
1.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari : Pembersihan bahu Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintasdi setiap kegiatan pemeliharaan rutin	Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Tirnur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan HidupKabupaten Lampung Timur

		ingkungan		Тијиап Кепсапа	Bentuk Pemantauan Lingi
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidnp yang Dipantau	Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi
2.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan laiu lintas seperti tundaan dan antrian	Identifikasi dan pendataan prosectur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintasdi setiap kegiatan pemeliharaan rutin Lokasi pemeliharaan Jalan Nasion. Lampung, Panggang denganBatas Lampung Kabupaten Timur 146,35km 146,35km
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga Identifikasi lokasi pemeliharaan berkala khususnya yang berada/berdekatan di STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa Pengukuran langsung kebisingan di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN Analisis deskriptif dari Lokasi berkala di Nasionaldi Lampung, Panggang denganBatas Lampung Kabupaten Timur 146,35km Immur 146,35km Identifikasi lokasi pemeliharaan berkala di STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa Pengukuran langsung kebisingan di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN Analisis deskriptif dari

		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup					
.n Hidup 	Waktu dan Frekuensi	Pelaksans	Pengawaa dan Pelaporan				
di Ruas Provinsi matang sampai bupaten sh/Batas ampung panjang	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jal Nasional	, ,				
diharaan Jalan Provinsi ematang sampai bupaten sh/Batas ampung panjang	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jak Nasional	, ,				

	Dampak L	ingkungan		Tuiuan Rencana	Bentuk Per	matanas Lingkungan Hidup		Institusi Pemants	uan Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkangan Hidup yang Dipantau	Pemaniakan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data hasil analisa	Lokasi Pantan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
2.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat: Parameter HC, CO (kategori bensitt) Parameter opasites (kategori diesel Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan emisi gas buang abat berat agar mensesuhi baku mutu emisi gas buang kendaram bermotor lama Mengendalikan debu agar memenahi baku mutu kualitas udara ambien	e Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga e Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan Pengukuran langsung debudi lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium terakreditasi KAN Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium terakreditasi KAN Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Lokasi pemelilaraan berkala di Ruas Ialan Nasionaldi Provinsi Lampung, Panggang sampai denganBatas Kabupaten Tengah/Batas Kabupaten Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jiku ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Runs Jafan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badaa Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas perneliharaan berkala	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti undaan dan antrian	Inventarisasi jenis rambu latu lintas sementara yang digunakan Observasi dan	Lokusi pemeliharaan berkala di Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pemetang Penggang sampai denganBetas Kabupaten	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Russ Jalan Nasional	- Direktorat Jenderal Perhubungan Danat Direktorat Lalu Lintes dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

	Dampak I	ingkungan		Tujuan Rencana	Rentuk Den	antauan Lingi
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Pernautauan Lingkungan Hid u p	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokesi 1
					terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Kabupaten Timur 146,35km
2.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat: Parameter HC, CO (kategori bensin) Parameter opasitas (kategori diese!) Debu aktifitas peningkatan struktur	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium Inventarisasi lokasi penyiraman Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan Pengukuran langsung debudi lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN Analisis deskriptif dari hasil analisa analisa deskriptigaman laboratorium terakreditasi KAN	Lokasi struktur di Nasionaldi Lumpung, Panggang denganBatas Lampung Kabupaten Timur 146,35km

n Hidap		Institusi Pemant	auan Lingkungan Hidup
a	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
mpung anjang		konstruksi	Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
gkatan Jalan movinsi matang sampai supaten h/Batas mpung sanjang	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

	Dampak L	ingkungan		T. J D	Bertale Bee	Tuel and Tue		Institusi Pemnats	una Lingkungan Hidup
No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data laboratorium	nantauan Lingkungan Hidup Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
3.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari peningkatan struktur	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintasdi setiap kegiatan peningkalan struktur	Lokasi sisa material dari kegiatan peningkatan strukturdi Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Russ Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
4.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas peningkatan struktur	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	kegiatan peningkatan strukturdi Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Penastang Panggang ampai dengan Batas Kabupaten Lampung Timur ampang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lahu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabu paten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/behum memuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP		6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan

No.	Dampak Lingkungan			Tuluna Barrara	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidap		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkuugan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Penguwas dan Pelaporan
3.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari pelebaran jalan	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum direktorat Jenderal Bina Marga	Lokasi pelebaran jalan di Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas pelebaran jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Lokasi pelebaran jalan di Ruas Jalan Nasionaldi Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai denganBatas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional Penyedia jasa konstruksi	Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RÍDHO FICARDO